

RINGKASAN

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS)* merupakan permasalahan kesehatan yang berkembang secara global dan membutuhkan penanganan yang kompleks. Banyumas merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kabupaten dengan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS yang tinggi. Pada tahun 2022 tercatat ada 181 kasus baru yang tercatat, meningkat dari tahun sebelumnya. Kasus HIV/AIDS tidak hanya ditangani oleh sektor kesehatan saja, namun harus ditangani secara multisektor. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015, dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018. Berdasar pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2018, Pemerintah Daerah berkewajiban dalam melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Pelaksanaan kewajiban seperti dimaksud tersebut kemudian dikoordinir oleh KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Banyumas. Sasaran informan dalam penelitian ini yaitu pengelola program HIV/AIDS di KPA dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, serta sub koordinator bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Penelitian ini menggunakan teori implementasi George C. Edwards. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode analisis Huberman (2014:19), aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Banyumas belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Banyumas dan Dinas Kesehatan diantaranya keterbatasan kecakapan pada anggota komunitas, keterlibatan OPD lain yang belum maksimal, serta anggaran yang terbatas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan terbukti berpengaruh di lapangan.

Kata Kunci : HIV/AIDS, Program, Implementasi, Komisi Penanggulangan AIDS

SUMMARY

Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) are health problems that are developing globally and require complex treatment. Banyumas is a district in Central Java Province which is included in the district with a high number of cumulative cases of HIV/AIDS. In 2022 there were 181 new cases recorded, an increase from the previous year. HIV/AIDS cases are not only handled by the health sector, but must be handled multisectorally. Therefore the Government of Banyumas Regency established a policy in the form of Regional Regulation Number 14 of 2015, followed by Regent Regulation Number 22 of 2018. Based on Banyumas Regent Regulation Number 22 of 2018, the Regional Government is obliged to implement HIV and AIDS prevention efforts. Implementation of such obligations is then coordinated by KPA or the AIDS Commission.

This research was conducted in Banyumas Regency, using qualitative research methods. The purpose of this study was to describe the implementation of HIV/AIDS prevention and control programs at the AIDS Commission in Banyumas District. The target informants in this study were the HIV/AIDS program managers at KPA and the Banyumas District Health Office, as well as the sub-coordinators for the prevention and control of infectious diseases. This study uses George C. Edwards' implementation theory. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation, and documentation. The data obtained was then analyzed using the Huberman analysis method (2014: 19), qualitative data analysis activities are carried out continuously until complete so that the data is saturated.

The results showed that the implementation of HIV/AIDS prevention and control programs in Banyumas Regency had not run optimally. The influencing factors are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. There are several obstacles faced by the Banyumas Aids Commission (KPA) and the Health Office, including limited skills of community members, the involvement of other OPDs that has not been maximized, and a limited budget. The research results also show that there are supporting and inhibiting factors that influence policy implementation and are proven to be influential in the field.

Keywords: HIV/AIDS, Program, Policy Implementation, Aids Commission